KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012

Novianto M. Hantoro*

Peneliti Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI
Email: nmhantoro@yahoo.com

Abstract

The Constitutional Court has decided to grant for in part of the petition of the Regional Representative Council (DPD) with respect to its authority in the field of legislation. By using the framework on bicameralism and constitutional interpretation, this paper analyzes how the Court to interpret legislative authority of DPD and how to implement the decision. The Court interpreted DPD has the authority to discuss Prolegnas, have the same status as the president in terms of submission of the bill to the House, and not only provides a view but come together to discuss the bill with the President and Parliament. But according to the Court, the DPD remain not equal with the House because the petition for approval of the bill and gave authorities more than just giving consideration to the state budget bill, was rejected. Although the Constitutional Court's decision executeable or can be implemented directly, but it still need for coordination with the President and the Parliament to regulate further the mechanism as system. Ideally, this needs to be formulated in the law, but for the purposes of short-term can be done through the formation of the Joint Rules.

Kata kunci: DPD, Pembentukan undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah menghasilkan beberapa lembaga negara baru, salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Yang menjadi gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan daerah.¹ Keinginan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa pengambilan putusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan daerah-daerah yang telah sampai

pada tingkat yang membahayakan keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional.² Anggota DPD menggantikan Utusan Daerah sebagai salah satu unsur dalam komposisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

DPD memiliki fungsi dan kewenangan yang salah satunya terkait dengan pembentukan undang-undang. Kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Terdapat tiga kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang yang disebutkan oleh Pasal 22D UUD 1945, yaitu: “dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”, “ikut membahas

¹ I Dewa Gede Palguna, *Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah*, makalah pada *Focus Group Discussion “Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”* di Semarang, 25 Maret 2003 dan di Malang, 26 Maret 2003 dalam Janedjri M. Gaffar, *et all* (editor), *Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta; Setjen MPR-UNDP, 2003, hal. 61-62.

² *Ibid.*

RUU”, dan “memberikan pertimbangan kepada DPR”, terhadap rancangan undang-undang tertentu. Ketentuan dalam UUD 1945 memerlukan penjabaran atau pengaturan lebih lanjut. Pada saat ini terdapat dua undang-undang yang menjabarkan ketentuan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjabaran ketentuan di dalam kedua undang-undang tersebut menerjemahkan ketentuan mengenai beberapa hal, misalnya “DPD mengajukan RUU kepada DPR” maka RUU tersebut kemudian menjadi RUU DPR; “DPD ikut membahas RUU tertentu” maka pembahasan tersebut dilakukan sebatas memberikan pandangan dan pendapat. Sedangkan “memberikan pertimbangan” dijabarkan bahwa pertimbangan tersebut dalam bentuk tertulis dan disampaikan sebelum dimulainya pembahasan.

Ketentuan di dalam kedua undang-undang tersebut memunculkan keberatan DPD yang menganggap ketentuan tersebut mereduksi kewenangan yang seharusnya atau yang diberikan oleh UUD 1945. Kemudian DPD mengajukan uji materi terhadap kedua undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Hal yang dimohonkan oleh DPD adalah:

1. Kewenangan DPD dalam mengusulkan RUU sebagaimana diatur di dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, yang menurut DPD, RUU dari DPD harus diperlakukan setara dengan RUU dari Presiden dan DPR;
2. Kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebutkan dalam Pasal 22D UUD 1945 bersama DPR dan Presiden;
3. Kewenangan DPD memberi persetujuan atas RUU yang disebutkan dalam Pasal 22D UUD 1945;
4. Keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas yang menurut DPD sama halnya dengan keterlibatan Presiden dan DPR;
5. Kewenangan DPD memberi pertimbangan terhadap RUU yang disebutkan dalam Pasal 22D UUD 1945;

Mahkamah Konstitusi telah melakukan sidang dan telah memutuskan permohonan *judicial review* tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya adalah mengabulkan sebagian permohonan DPD, bukan semua permohonan. Namun demikian putusan yang menerima permohonan DPD dapat dikatakan memberikan perubahan besar pada pelaksanaan fungsi DPD di bidang legislasi. Dengan demikian, menjadi kajian yang menarik, bagaimana memahami putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan bagaimana mengimplementasikannya.

Berkenaan dengan fungsi legislasi DPD, Tim Hukum Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR pada tahun 2003 telah melakukan Penelitian mengenai “Ruang Lingkup dan Mekanisme Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah”. Dilihat dari tahun penelitian yang dilakukan, dapat diketahui undang-undang yang dianalisis adalah UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Namun demikian, isu-isu yang terdapat dalam putusan MK tersebut telah menjadi obyek penelitian. Penelitian juga menggunakan metode historis dengan membandingkan keberadaan Senat pada masa berlakunya Konstitusi RIS. Kesimpulan penelitian juga menemukan kelemahan yang salah satunya adalah kewenangan yang dimiliki DPD tidak seimbang dengan ongkos dan nilai pemilihan umum yang demokratis.³ Sementara analisis dalam kajian ini, meskipun menyinggung juga peraturan yang melandasi mekanisme kerja DPD periode sebelumnya, namun akan lebih dikaitkan dengan peraturan yang berlaku pada DPD periode sekarang, yaitu UU No. 27 Tahun 2009 dan UU No. 12 tahun 2011 yang menjadi obyek dalam uji materi yang diajukan oleh DPD kepada Mahkamah Konstitusi.

B. Permasalahan

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, praktik dan mekanisme pembentukan undang-undang harus disesuaikan.

³ Innocentius Samsul, *et al.* (Tim Hukum P3DI, Setjen DPR RI). *Ruang Lingkup dan Mekanisme Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPD*, Jakarta, P3I Setjen DPR RI, 2003, hal. 82.

Hal pertama yang paling penting adalah mengetahui bagaimana memahami putusan tersebut atau dengan kata lain bagaimana MK menafsirkan ketentuan UUD 1945 terkait dengan kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana melaksanakan putusan tersebut. Selama ini masih berkembang pemikiran apakah perlu adanya revisi terhadap kedua undang-undang tersebut sebelum mengimplementasikan putusan MK atau bagaimanakah mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seketika tanpa melalui perubahan undang-undang. Tulisan ini akan menganalisa dua hal, *pertama* penafsiran MK terhadap kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang yang tercermin di dalam putusannya; *Kedua*, menganalisa bagaimana melaksanakan putusan MK tersebut dalam praktik pembentukan undang-undang sekarang ini.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Penafsiran Konstitusi

Satjipto Rahardjo⁴ mengemukakan, salah satu sifat yang melekat pada hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusannya. Pengutaraan dalam bentuk tulisan atau *litera scripta* merupakan bentuk dari usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran. Ide atau pikiran yang hendak dikemukakan tersebut ada disebut sebagai “semangat” dari suatu peraturan. Usaha untuk menggali “semangat dari peraturan tersebut” dengan sendirinya merupakan bagian dari keharusan yang melekat khusus pada hukum perundang-undangan yang bersifat tertulis. Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan.

Di dalam ilmu hukum, selain dikenal metode penafsiran hukum secara umum, dikenal pula metode penafsiran konstitusi (*constitutional*

interpretation method). Bobbitt mengidentifikasi 6 (enam) macam metode penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*), yaitu:⁵

1. Penafsiran tekstual;
Penafsiran tekstual (*textualism or literalism*) atau penafsiran harfiah ini merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh pembentuk konstitusi (*meaning of the words in the legislative text*).
2. Penafsiran historis (atau penafsiran orisinal);
Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran asli (*original*), yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi itu dibahas dan ditetapkan. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan pendekatan *original intent* terhadap norma-norma hukum konstitusi.
3. Penafsiran doktrinal;
Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan Undang-Undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan.
4. Penafsiran prudensial;
Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau Undang-Undang tertentu.
5. Penafsiran struktural; dan
Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam Undang-Undang dengan konstitusi yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan.
6. Penafsiran etikal
Penafsiran etikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 93-95.

⁵ Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000, hal. 5.

etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Metode penafsiran ini dikonstruksi dari tipe berpikir konstitusional yang menggunakan pendekatan falsafati, aspirasi atau moral. Dengan demikian metode penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan.

Menurut Anthony Mason, interpretasi atau penafsiran ini merupakan penafsiran yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah yang terdapat dalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan dan struktur konstitusi.⁶

Menurut Arsyad Sanusi⁷, di Amerika Serikat terdapat pendapat yang menyatakan bahwa dalam menafsirkan konstitusi, hakim harus berupaya untuk menelusuri bagaimana ketentuan-ketentuan dalam konstitusi itu dari semula diartikan oleh pihak yang merumuskan dan mengesahkan konstitusi itu. Pendekatan ini menyatakan bahwa semakin dekat dengan pengertian aslinya maka semakin “benar” penafsiran tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya konsep *backward-looking*. Pendekatan semacam ini dikenal dengan pendekatan *originalisme*. Sedangkan, pada kutub yang lain, terdapat pandangan yang menekankan pentingnya inovasi dan dinamisme, serta menolak *originalisme*. Kelompok yang menghendaki demikian ini berpendapat bahwa konstitusi perlu ditafsirkan secara kreatif karena adanya ketidakpastian bahasa dalam undang-undang (konstitusi). Dengan demikian dari sekian banyak metode penafsiran, pada dasarnya metode penafsiran konstitusi dapat dibedakan hanya menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu:

metode penafsiran *originalism*, yang menggunakan pendekatan *original intent* dan *non originalism*, yang menggunakan pendekatan di luar pendekatan *original intent*.

B. Bikameralisme

Terdapat beberapa istilah untuk menyebutkan lembaga perwakilan berdasarkan fungsi dan kewenangannya. Lembaga perwakilan disebut parlemen berdasarkan kata Perancis *parler* yang artinya berbicara. Lembaga perwakilan juga disebut sebagai badan legislatif atau badan pembentuk undang-undang karena tugasnya *legislate* yang artinya membentuk atau membuat undang-undang.⁸ Arend Lijphart mengklasifikasikan badan pembentuk undang-undang ke dalam tiga variabel, yaitu:⁹

1. Bikameral/unikameral (*bicameralism/unicameralism*),
2. *symmetrical/asymmetrical bicameralism* (*is one house dominant, or are they essentially equal*), dan
3. *congruent/incongruent bicameralism* (*do the two houses represent essentially the same population or does the second chamber reflect a different basis of representation*).

Sistem bikameral kemudian dapat diklasifikasikan berdasarkan perbandingan kekuatan antara *the lower chamber* dan *the upper chamber*, yaitu sistem *bicameral* yang lemah (*asymmetric bicameralism* atau *weak bicameralism/soft bicameralism*), yaitu apabila kekuatan salah satu kamar, jauh lebih dominan atas kamar lainnya. Sistem *bicameral* yang kuat (*symmetric bicameralism* atau *strong bicameralism*), yaitu apabila kekuatan antara dua kamarnya nyaris sama kuat atau sama kuat.¹⁰

Menurut Lijphart, terdapat beberapa aspek yang pada akhirnya akan membedakan apakah lembaga perwakilan suatu negara menganut “*strong bicameralism*” atau “*weak bicameralism*”. Aspek penting pertama dan yang paling

⁶ Anthony Mason, *The Interpretation of a Constitution in a Modern Liberal Democracy*, dalam Charles Sampford and Kim Preston (Ed.), *Interpreting Constitutions- Theories, Principles and Institutions*. Leichhardt, The Federation Press, 1996 hal. 14.

⁷ M. Arsyad Sanusi, *Legal Reasoning Dalam Penafsiran Konstitusi* dalam <http://arfanhy.blogspot.com/2009/03/legal-reasoning-dalam-penafsiran.html> diakses pada tanggal 22 Oktober 2013.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; PT. Gramedia, 1988, hal. 174.

⁹ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy; Government Forms and Performance in Thirty Six Countries*. New Haven and London, Yale University Press, 1999. hal. 201-215.

¹⁰ *Ibid.*

utama adalah kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh kedua lembaga perwakilan. Pola yang umum di beberapa negara, “kamar kedua” cenderung subordinat dari “kamar pertama”.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, apabila kedua lembaga memiliki kewenangan yang sama, maka disebut simetris, namun apabila kewenangan lembaga yang satu lebih tinggi dari lembaga yang lain, maka disebut asimetris.

Kedua, untuk mengetahui apakah lembaga tersebut mempunyai arti politik yang penting (*political important*) dapat dilihat dari metode pemilihan. Pada umumnya, anggota pada “kamar pertama” dipilih secara langsung oleh pemilih, sedangkan anggota “kamar kedua” dipilih oleh lembaga legislatif daerah atau diangkat. Kemudian apakah “kamar kedua” didesain untuk mewakili golongan-golongan tertentu atau minoritas. Apabila hal tersebut terjadi, maka komposisinya disebut *incongruent*.

III. ANALISA

A. Kewenangan Legislasi DPD berdasarkan Putusan MK

Tulisan ini akan menganalisa dua hal, *pertama*, penafsiran MK terhadap kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang yang tercermin di dalam putusannya; *Kedua*, menganalisa bagaimana melaksanakan putusan MK tersebut dalam praktik pembentukan undang-undang sekarang ini. Untuk menganalisa kewenangan DPD dalam fungsi legislasi berdasarkan putusan

¹¹ Contoh yang disebutkan: *their negative votes on proposed legislation can frequently be overridden by the first chambers, and in most parliamentary systems the cabinet is responsible exclusively to the first chamber. In two countries, disagreement between the two chambers is settled by a joint session: India and Venezuela. Here the relative sizes of the two chambers, discussed in the previous section, do make a difference with regard to the strength of bicameralism. The Indian second chamber is almost half the size of the first, whereas the Venezuelan senate has less than one-fourth of the members of the lower house. The only examples of bicameral legislatures with formally equal powers in our set of democracies are the legislatures of Colombia, Italy, Switzerland, and the United States; three countries used to have formally equal chambers-Belgium, Denmark, and Sweden-but the Belgian Senate's power was severely reduced when it was elected in its new federal form in 1995, and Denmark and Sweden abolished their second chambers in 1953 and 1970, respectively.*

MK, akan diuraikan terlebih dahulu pengaturan kewenangan DPD pada DPD periode 2004-2009 dan DPD periode 2009-2014. Selanjutnya diuraikan berdasarkan permohonan yang diajukan DPD (*petita*), serta bagaimana pertimbangan MK dalam amar putusannya.

a. Pengajuan RUU

Dalam hal pengajuan usul RUU, selain ketentuan yang ada di dalam UUD 1945, diatur secara singkat di dalam UU No. 22 Tahun 2003 bahwa DPD mengusulkan rancangan undang-undang untuk hal-hal yang telah disebutkan di dalam UUD 1945 kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR. Pembahasan rancangan undang-undang tersebut dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dengan pemerintah.

Pengaturan mengenai pengajuan RUU di dalam UU No. 10 Tahun 2004 dikaitkan dengan Prolegnas. Undang-Undang menyebutkan bahwa RUU baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun dari Dewan Perwakilan Daerah disusun berdasarkan Prolegnas. Norma selanjutnya sama dengan ketentuan UUD 1945 bahwa DPD hanya mengajukan RUU sebagaimana yang telah diatur UUD 1945. Namun kemudian terdapat aturan dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas. Penafsirannya (*secara a contrario*) DPD tidak dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas. Selanjutnya terkait dengan pengajuan RUU diatur bahwa RUU yang berasal dari DPD dapat diajukan oleh DPD kepada DPR. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan RUU diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPR dan Peraturan Tata Tertib DPD.

Pengaturan di dalam Tata Tertib DPR terkait dengan RUU yang berasal dari DPD, adalah sebagai berikut:

- 1) RUU beserta penjelasan, keterangan, dan/ atau naskah akademis yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR.
- 2) Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh Pimpinan DPR,

Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota.

- 3) Setelah Usul RUU diumumkan dalam Rapat Paripurna, Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman RUU yang berasal dari DPD tersebut kepada Anggota dalam Rapat Paripurna.
- 4) Badan Musyawarah selanjutnya menunjuk Komisi atau Badan Legislasi untuk membahas RUU tersebut, serta mengagendakan pembahasannya.
- 5) Komisi atau Badan Legislasi, mengundang anggota alat kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas RUU dimaksud.
- 6) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Komisi atau Badan Legislasi mengundang, alat kelengkapan DPD wajib hadir.
- 7) Hasil pembahasan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- 8) RUU yang telah dibahas disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.
- 9) Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR, Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR.
- 10) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya, berlaku ketentuan Pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 138, dengan memperhatikan ketentuan yang khusus bagi Rancangan Undang-Undang dari DPR.
- 11) Hari kerja yang dimaksud pada ayat (6) adalah hari kerja DPR pada Masa Sidang.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan DPR pada awal pengaturan mengenai DPD

(DPD periode 2004-2009) terlihat bahwa RUU yang diajukan oleh DPD dibahas terlebih dahulu oleh alat kelengkapan DPR dengan mengundang alat kelengkapan DPD. Hasil pembahasan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR, tanpa diatur mengenai pengambilan keputusan. RUU tersebut kemudian disampaikan oleh DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang mewakili dalam pembahasan RUU di DPR.

Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut kemudian mengalami perubahan pada periode DPR dan DPD sekarang ini (periode 2009-2014). UU No. 22 Tahun 2003 telah diganti dengan UU No. 27 tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2004 telah diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011; dan Peraturan Tata Tertib DPR tahun 2005 telah diganti dengan Peraturan Tata Tertib DPR Tahun 2009. Pengaturan mengenai pengajuan RUU DPD kepada DPR juga mengalami perubahan mekanisme. Perubahan yang cukup mendasar adalah RUU yang diusulkan oleh DPD diharmonisasi terlebih dahulu di Badan Legislasi untuk kemudian disampaikan ke Rapat Paripurna. Rapat Paripurna mengambil keputusan terhadap RUU tersebut, apakah disetujui, disetujui dengan perubahan; atau ditolak. Perubahan tersebut memang menjadikan RUU dari DPD disamakan kedudukannya dengan usul RUU yang diajukan oleh anggota atau alat kelengkapan DPR.

Hal tersebut pula yang menjadi dasar pengajuan atau dalil uji material yang dilakukan oleh DPD sebagai pemohon, bahwa Undang-Undang telah mereduksi kewenangan legislasi DPD sebagai sebuah lembaga negara menjadi setara dengan kewenangan legislasi anggota, komisi, dan gabungan komisi DPR.¹² Selanjutnya juga dikemukakan bahwa UU secara sistematis mengurangi kewenangan DPD sejak awal proses pengajuan RUU dan telah mendistorsi RUU yang diusulkan oleh DPD menjadi RUU usul DPR¹³. Selanjutnya UU No. 12 Tahun 2011 juga dianggap telah merendahkan kedudukan

¹² Pasal 102 ayat (1) huruf d dan huruf e UU No. 27 Tahun 2009, Pasal 48 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011.

¹³ Pasal 143 ayat (5) dan Pasal 144 UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 147 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009.

DPD menjadi lembaga yang sub-ordinat di bawah DPR karena meniadakan kewenangan konstitusional DPD untuk dapat mengajukan RUU.¹⁴

Terhadap dalil permohonan DPD tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi kewenangan konstitusional DPD mengenai pengajuan RUU, telah ditegaskan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”. Menurut MK, kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan pilihan subjektif DPD “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan” RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD. Kata “dapat” tersebut bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan demikian, DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. MK menilai, menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU usul DPD,

kemudian dibahas oleh Badan Legislasi DPR, dan menjadi RUU dari DPR adalah ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945;

Di dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran tekstual dan struktural. Mahkamah Konstitusi memaknai kata “dapat mengajukan” sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan. Selanjutnya dengan menggunakan penafsiran struktural, Mahkamah Konstitusi menyamakan posisi DPD dengan Presiden yang juga mempunyai hak untuk mengajukan RUU ke DPR. Sementara rumusan di dalam undang-undang menggunakan konsep bikameral yang asimetrikal, bahwa konsep di UUD 1945 memang tidak memberikan kewenangan legislasi yang *equal* antara DPR dan DPD.

b. Penyusunan, Pembahasan, dan Penetapan Prolegnas

Ketentuan mengenai Prolegnas memang tidak diatur di dalam UUD 1945. Ketentuan mengenai Prolegnas diatur di dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terdapat satu tahapan yang diatur yaitu perencanaan. Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Di dalam penyusunan Prolegnas tersebut, tidak disebutkan bagaimana keterlibatan DPD. Undang-undang hanya menyebutkan bahwa Penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

¹⁴ Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 46 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

Seiring dengan penggantian UU No. 10 Tahun 2004 dengan UU No. 12 Tahun 2011, terdapat ketentuan Pasal 21 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat. DPD mendalilkan bahwa ketentuan dalam UU No. 12 tahun 2011¹⁵ telah meniadakan kewenangan DPD untuk dapat mengajukan RUU, baik di dalam maupun di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Terhadap dalil DPD tersebut, menurut MK, keikutsertaan dan keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas seharusnya merupakan konsekuensi dari norma Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan RUU yang dimiliki DPD. Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 UU 12 Tahun 2011, perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Dengan demikian, RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas tidak menjadi prioritas untuk dibahas. Apabila DPD tidak terlibat atau tidak ikut serta menentukan Prolegnas, maka sangat mungkin

¹⁵ Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011.

DPD tidak dapat melaksanakan wewenangnya untuk mengajukan RUU sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, karena dapat saja RUU tersebut tidak menjadi prioritas sehingga tidak akan dibahas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut MK, norma Undang-Undang yang tidak melibatkan DPD dalam penyusunan Prolegnas telah mereduksi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945. Dengan demikian permohonan DPD beralasan menurut hukum.

Meskipun kewenangan DPD mengenai Prolegnas tidak diatur di dalam UUD 1945, namun MK melakukan penafsiran struktural, yaitu dengan mengaitkannya terhadap Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 berkenaan dengan kewenangan DPD untuk mengajukan RUU tertentu. Tanpa keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas, maka terdapat kemungkinan DPD tidak dapat mengajukan RUU mengingat RUU yang akan diajukan kemungkinan tidak masuk dalam daftar Prolegnas atau prioritas.

c. Pembahasan RUU

UU No. 22 Tahun 2003 mengatur bahwa dalam hal ikut membahas RUU, DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama dengan pemerintah pada awal Pembicaraan Tingkat I sesuai Peraturan Tata Tertib DPR. Pembicaraan Tingkat I yang dimaksud dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah dalam hal penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas rancangan undang-undang, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga. Pandangan, pendapat, dan tanggapan tersebut dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah.

Tambahan pengaturan mengenai pembahasan undang-undang yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 2004 adalah:

- 1) Keikutsertaan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan rancangan undang-undang pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.

- 2) Keikutsertaan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan rancangan undang-undang diwakili oleh komisi yang membidangi materi muatan rancangan undang-undang yang dibahas.

Pada periode berikutnya, UU No. 27 Tahun 2009 mengatur keikutsertaan DPD dengan lebih maju, yaitu dalam pengantar musyawarah dan pendapat mini pada tingkat I dan pendapat mini tersebut disampaikan dalam laporan di paripurna pada pembicaraan tingkat II sebelum diambil keputusan.

DPD mendalilkan beberapa pasal dalam undang-undang¹⁶:

- 1) tidak mengikutsertakan DPD dalam seluruh proses pembahasan RUU yang menjadi kewenangan konstitusional DPD;
- 2) telah meniadakan kewenangan DPD untuk mengajukan dan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang justru merupakan “inti” dari pembahasan RUU;
- 3) telah mereduksi kewenangan DPD dengan mengatur bahwa pembahasan RUU tetap dilaksanakan meski tanpa keterlibatan DPD;
- 4) menghilangkan kewenangan DPD karena setiap RUU sepanjang yang berkaitan dengan kewenangan DPD seharusnya dibahas oleh DPR yang diwakili oleh alat kelengkapan DPR *in casu* bukan fraksi, Presiden yang diwakili oleh menteri yang ditunjuk, dan DPD yang diwakili oleh alat kelengkapan DPD;

Menurut pertimbangan MK, kewenangan DPD untuk membahas RUU telah diatur dengan tegas dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan

pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama”. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPD sebagai lembaga negara mempunyai hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penggunaan frasa “ikut membahas” dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 telah menentukan secara tegas bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Penggunaan frasa “ikut membahas” adalah wajar karena Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 disahkan pada Perubahan Pertama UUD 1945 tahun 1999, sedangkan Pasal 22D UUD 1945 disahkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Hal itu berarti bahwa, “ikut membahas” harus dimaknai DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, bersama DPR dan Presiden. Dengan demikian, pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Menurut MK, pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan

¹⁶ Pasal 65 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011; Pasal 150 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009 dan Pasal 68 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 147 ayat (7), Pasal 150 ayat (5) UU No. 27 Tahun 2009, serta Pasal 68 ayat (5) UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 150 ayat (4) huruf a, Pasal 151 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 27 Tahun 2009, serta Pasal 68 ayat (2) huruf c dan huruf d, dan ayat (4) huruf a dan Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011.

sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. Begitu pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. Konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga DIM, diajukan oleh masing-masing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR seharusnya DIM diajukan oleh DPR, bukan DIM diajukan oleh fraksi. Walaupun demikian, MK dapat memahami bahwa mekanisme pembahasan RUU dengan membahas DIM yang diajukan oleh fraksi adalah praktik pembahasan RUU sebelum perubahan UUD 1945. Selanjutnya pembahasan pada tingkat Alat Kelengkapan DPR yang sudah mengundang Presiden dan/atau sudah mengundang DPD, maka DPR dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh Alat Kelengkapan DPR sebagai satu kesatuan kelembagaan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut MK, Pasal 147, Pasal 150 ayat (2), ayat (3) UUNo. 27 Tahun 2009 dan Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (2), ayat (3) UU 12 Tahun 2011 telah mengurangi kewenangan konstitusional DPD untuk membahas RUU sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945.

d. Ikut Menyetujui RUU

Ketentuan ikut menyetujui RUU bukan merupakan kewenangan DPD yang disebutkan di dalam UUD 1945. Namun demikian, DPD mendalilkan bahwa Pasal 71 huruf a, huruf d, dan huruf e, UU No. 27 Tahun 2009; Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 telah mereduksi kewenangan konstitusional DPD untuk ikut serta dalam memberikan persetujuan sebagai produk dari mekanisme ikut membahas suatu RUU yang terkait dengan kewenangannya.

Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut MK, Pasal 22D ayat (2) UUD 1945

telah menentukan dengan jelas bahwa DPD hanya berwenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dan tidak ikut serta pada pemberian persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan pada rapat paripurna DPR pembahasan Tingkat II. Artinya, DPD dapat saja ikut membahas dan memberi pendapat pada saat rapat paripurna DPR yang membahas RUU pada Tingkat II, tetapi tidak memiliki hak memberi persetujuan terhadap RUU yang bersangkutan. Persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang, terkait dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa hanya DPR dan Presidenlah yang memiliki hak memberi persetujuan atas semua RUU. Kewenangan DPD yang demikian, sejalan dengan kehendak awal (*original intent*) pada saat pembahasan pembentukan DPD pada Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berlangsung sejak tahun 2000 sampai tahun 2001. Semula, terdapat usulan bahwa kewenangan DPD termasuk memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang, tetapi usulan tersebut ditolak. Pemahaman yang demikian sejalan dengan penafsiran sistematis¹⁷ atas Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.

Bahwa Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengandung dua kewenangan, yaitu kewenangan untuk membahas dan kewenangan untuk menyetujui bersama antara DPR dan Presiden,

¹⁷ Penafsiran sistematis adalah metode interpretasi yang antara lain diidentifikasi oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. Pengertiannya, terjadinya suatu Undang-Undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap Undang-Undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 19-20.

sedangkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 hanya menegaskan DPD ikut membahas tanpa ikut memberi persetujuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, DPD tidak ikut memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang. Penafsiran ini sesuai dengan *originalism*, bahwa pembentukan DPD memang dengan kewenangan terbatas dan *unequal* dengan DPR. Bahkan Jimly menyebutkan dalam bidang legislasi, fungsi DPD hanyalah sebagai *co-legislator* di samping DPR. Sifat tugasnya di bidang legislasi hanya menunjang (*auxiliary agency*) tugas konstitusional DPR.¹⁸

e. Memberikan Pertimbangan

Dalam hal memberikan pertimbangan, UU No. 22 Tahun 2003 mengatur bahwa pertimbangan DPD diberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan pemerintah. Pertimbangan tersebut menjadi bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah. Dalam UU No. 10 Tahun 2004, tidak ada pengaturan atau penjabaran lebih lanjut mengenai pemberian pertimbangan. Undang-undang hanya mengulang apa yang disebutkan dalam UUD 1945 bahwa DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Peraturan Tata Tertib DPR yang tertuang di dalam Keputusan DPR No.: 08/DPR RI/I/2005-2006 mengatur ketentuan pemberian pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Terhadap RUU yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama, DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis yang disampaikan oleh DPD, sebelum memasuki tahap pembahasan antara DPR dengan Presiden.
- 2) Apabila Rancangan Undang-Undang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Presiden, setelah Pimpinan DPR menerima Surat Pengantar Presiden,

Pimpinan DPR menyampaikan surat kepada Pimpinan DPD untuk memberikan pertimbangannya

- 3) Apabila Rancangan Undang-Undang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari DPR, setelah Pimpinan DPR menyampaikan surat kepada Presiden, Pimpinan DPR menyampaikannya juga kepada Pimpinan DPD untuk memberikan pertimbangannya.
- 4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan secara tertulis melalui Pimpinan DPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- 5) Pada Rapat Paripurna berikutnya, setelah pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota perihal diterimanya pertimbangan atas rancangan undang-undang dan meneruskannya kepada Badan Musyawarah untuk meneruskan kepada alat kelengkapan yang akan membahasnya.
- 6) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPD belum juga memberikan pertimbangan, DPD dianggap tidak memberikan pertimbangan, dan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan.
- 7) Hari kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah hari kerja DPR pada Masa Sidang.

Pada periode berikutnya UU No. 27 Tahun 2009 mengatur hampir sama dengan apa yang diatur oleh Peraturan Tata Tertib, yaitu:

- 1) DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis terhadap rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama yang disampaikan oleh DPD sebelum memasuki tahap pembahasan antara DPR dan Presiden.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (cetakan kedua); Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006, hal 83.

- 2) Apabila rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Presiden, pimpinan DPR setelah menerima surat Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan DPD agar DPD memberikan pertimbangannya.
- 3) Apabila rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari DPR, Pimpinan DPR menyampaikan surat kepada pimpinan DPD agar DPD memberikan pertimbangannya.
- 4) Pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis melalui pimpinan DPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR, kecuali rancangan undang-undang tentang APBN disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
- 5) Pada rapat paripurna berikutnya, pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota DPR perihal diterimanya pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan meneruskannya kepada Badan Musyawarah untuk diteruskan kepada alat kelengkapan yang akan membahasnya.

DPD mendalilkan, Pasal 71 huruf f dan huruf g, serta Pasal 107 ayat (1) huruf c UU No. 27 Tahun 2009 bermakna bias dan mengaburkan esensi DPD dalam proses pembahasan RUU yang terkait dengan kewenangannya. Selain itu, tugas Badan Anggaran dalam pembahasan RUU APBN tidak mempertimbangkan pertimbangan DPD.

Terhadap dalil DPD tersebut, menurut MK, makna “memberikan pertimbangan” sebagaimana yang dimaksud Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden

untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka MK telah melakukan penafsiran mengenai kewenangan legislasi DPD melalui putusannya terhadap uji materi Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang diajukan oleh DPD. Penafsiran MK melalui putusan tersebut menjabarkan lebih lanjut ketentuan mengenai kewenangan legislasi DPD. Beberapa point penting dalam putusan MK terkait dengan kewenangan DPD adalah:

1. menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU usul DPD, kemudian dibahas oleh Badan Legislasi DPR, dan menjadi RUU dari DPR adalah ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD;
2. Pasal 147, Pasal 150 ayat (2), ayat (3) UU No. 27 tahun 2009 dan Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (2), ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 telah mengurangi kewenangan konstitusional DPD untuk membahas RUU sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945;
3. DPD tidak ikut memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi undang-undang;
4. Norma undang-undang yang tidak melibatkan DPD dalam penyusunan Program Legislasi Nasional telah mereduksi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945;
5. “memberikan pertimbangan” sebagaimana yang dimaksud Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan.

B. Tindak Lanjut Putusan MK

Adanya putusan MK tersebut, bukan berarti tidak menyalakan permasalahan di dalam implementasinya. Masih terdapat beberapa hal yang perlu disepakati secara politis dan diperjelas dalam pelaksanaan putusan tersebut. Putusan MK memang *final and binding* dan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, dengan demikian pada dasarnya putusan MK harus langsung dilaksanakan tanpa perlu melakukan perubahan terlebih dahulu terhadap undang-undang terkait. Namun demikian, akan terdapat celah-celah kekosongan hukum untuk mengatur mekanisme pelaksanaannya secara lebih teknis, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:

a. Prolegnas

Berdasarkan undang-undang, Prolegnas ditetapkan untuk satu periode keanggotaan (5 tahun). Selanjutnya setiap tahunnya ditetapkan Prolegnas Prioritas Tahunan. Menurut ketentuan undang-undang, Prolegnas prioritas tahunan tersebut seharusnya sudah ditetapkan sebelum penetapan RUU APBN (bulan Oktober), namun ketentuan ini belum pernah dipenuhi. Prolegnas prioritas tahunan sebelumnya ditetapkan pada akhir tahun. Terkait dengan putusan MK berkenaan dengan kewenangan DPD dalam penetapan Prolegnas, untuk prolegnas 5 tahunan tentunya sudah tidak dapat dilakukan karena telah ditetapkan pada awal masa keanggotaan dan putusan MK ini tentunya tidak berlaku surut. Dengan demikian putusan ini hanya akan diterapkan pada saat penyusunan, pembahasan, dan penetapan Prolegnas Prioritas Tahun 2014 atau tahun terakhir periode keanggotaan DPR dan DPD. Permasalahan muncul mengingat Prolegnas Prioritas Tahunan itu sendiri berdasarkan pada Prolegnas yang 5 Tahunan. Dengan demikian, ada potensi bahwa dalam pembahasan Prolegnas prioritas tahun 2014 yang melibatkan DPD, akan terjadi evaluasi terhadap Prolegnas 5 Tahunan.

Selanjutnya terkait dengan masalah teknis mekanisme pembahasan dan format daftar Prolegnas. Mekanisme penyusunan

dan pembahasan prolegnas tahunan akan mengalami perubahan apabila berdasarkan putusan MK, yang semula DPD terintegrasi ke dalam usulan DPR menjadi pihak tersendiri, sehingga pembahasan akan dilakukan secara tripartit, yaitu antara DPR, Presiden, dan DPD. Masing-masing lembaga menyiapkan usulan dan kemudian usulan tersebut dibahas secara bersama. Pembahasan tetap dilakukan di DPR dengan melibatkan ketiga lembaga tersebut. Keputusan juga harus disepakati oleh ketiga lembaga tersebut. Mengingat penetapan Prolegnas dengan Keputusan DPR tidak dibatalkan oleh MK, maka pengambilan keputusan dilakukan di Rapat Paripurna DPR dan ditetapkan dengan bentuk hukum keputusan DPR. Berkenaan dengan format daftar Prolegnas, sekarang ini format daftar prolegnas tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 2011. Format daftar Prolegnas 5 tahunan hanya terdiri dari 3 kolom, yaitu Nomor, Judul, dan Keterangan.

No.	Judul	Keterangan

Format daftar Prioritas Tahunan terdiri dari 4 kolom sebagai berikut:

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN

Berdasarkan Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2011, Prolegnas memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:

- latar belakang dan tujuan penyusunan;
- sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- jangkauan dan arah pengaturan.

Dengan demikian, apabila digambarkan dalam format, maka seharusnya format Prolegnas adalah sebagai berikut:

No.	Judul RUU	Materi yang diatur	Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain	Keterangan
		Berisi: latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; dan jangkauan dan arah pengaturan.		

Kolom keterangan merupakan tambahan yang dapat digunakan untuk memberikan keterangan sebagaimana yang telah dilakukan selama ini, yaitu apakah RUU tersebut dan Naskah akademiknya disiapkan oleh DPR, Pemerintah, dan sesuai dengan keputusan MK ditambah dengan DPD. Dengan demikian, prolegnas tidak sekedar terlihat sebagai daftar kumpulan judul RUU, melainkan dapat terbaca kemana arah pengaturan yang hendak dituju. Termasuk pula untuk mengantisipasi adanya perbedaan penafsiran apakah sebuah RUU terkait dengan kewenangan DPD untuk dapat mengajukan dan membahas; memberikan pertimbangan; atau tidak terkait dengan kewenangan DPD. Selama ini masih ada beberapa RUU yang masuk ranah “abu-abu”, seperti RUU tentang Kepelabuhanan. Penetapan di awal melalui Prolegnas akan mencegah potensi terjadinya sengketa kewenangan antara DPD dengan DPR dan Presiden.

b. Pengajuan RUU

UUD 1945 menyebutkan bahwa RUU DPD diajukan kepada DPR. Berdasarkan putusan MK, DPR tidak lagi melakukan pembahasan atau pengambilan keputusan terhadap RUU tersebut. Namun demikian, DPD tidak dapat secara bersamaan juga “mengajukan RUU” kepada Presiden, sebagaimana putusan MK yang menyebutkan:

“Pasal 146 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden”

Seharusnya DPR yang menyampaikan RUU usul DPD tersebut kepada Presiden dan meminta agar Presiden menunjuk Menteri yang mewakilinya dalam pembahasan. Demikian pula dengan RUU dari Presiden. Putusan MK menyatakan:

“Pasal 144 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”.

Apabila MK konsisten dengan penafsiran kewenangan DPD sama dengan kewenangan Presiden, maka Presiden hanya mengajukan RUU kepada DPR, dan DPR yang akan menyampaikan dan mengundang DPD untuk membahas bersama atau memberikan pertimbangan. DPR merupakan muara dari pengajuan RUU, meskipun kemudian tidak dapat mengambil keputusan terhadap RUU tersebut sebelum dibahas secara bersama.

Apalagi sebelum adanya pemetaan kewenangan yang tertuang di dalam Prolegnas, ada potensi terjadinya perbedaan pendapat mengenai substansi RUU. Ada kemungkinan DPD atau Presiden menganggap materi muatan RUU tersebut masuk ke dalam kewenangan DPD, namun DPR dapat berpendapat sebaliknya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka sebaiknya pemetaan RUU dan keterkaitannya dengan kewenangan DPD harus dilakukan terlebih dahulu dan ditetapkan dalam Prolegnas.

c. Ikut membahas

Hal penting yang harus dicermati terkait dengan putusan MK mengenai kewenangan DPD ikut membahas RUU bersama dengan DPR dan Presiden adalah pada saat pembahasan DIM. Selama ini Presiden merupakan satu kesatuan lembaga (meskipun dalam pembahasan terkadang di antara kementerian terdapat perbedaan pendapat), demikian pula dengan DPD, apakah ada perbedaan pendapat antardaerah yang direpresentasikan oleh anggota DPD, namun permasalahan tersebut harus sudah diselesaikan di internal lembaga masing-masing dan ketika pembahasan, kedua lembaga tersebut satu pendapat. Berbeda dengan DPR yang komposisinya terdiri dari fraksi-fraksi, kecuali dalam hal RUU berasal dari DPR karena sudah melalui pembahasan di internal DPR. Untuk RUU yang disampaikan oleh Pemerintah dan DPD, mekanisme yang berlangsung sekarang ini, bukan dibahas terlebih dahulu oleh fraksi-fraksi untuk menghasilkan satu pendapat DPR, melainkan langsung dibahas dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berisikan pendapat fraksi-fraksi. Tidak mungkin pembahasan RUU yang diusulkan oleh Presiden dan DPD hanya disandingkan dengan satu DIM, pendapat DPR. Pendapat DPR diputuskan menjadi satu pada Pembicaraan tingkat II ketika Pimpinan Rapat Paripurna menanyakan persetujuan masing-masing fraksi. Apabila masih terdapat perbedaan pendapat, maka keputusan dilakukan melalui suara terbanyak (*voting*). Setelah *voting* di DPR, baru kemudian ditanyakan pendapat Presiden. Dalam hal ini, DPD tidak dimintakan pendapatnya karena RUU ditetapkan menjadi undang-undang hanya dengan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Ada kemungkinan Presiden tidak menyetujui pendapat DPR hasil *voting* tersebut, sehingga RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama.

Dengan demikian, untuk RUU dari Presiden kolom DIM nya adalah No. DIM; RUU; Usulan Fraksi-Fraksi; dan Usulan DPD. Demikian pula apabila RUU dari DPD kolomnya adalah No. DIM; RUU; Usulan Fraksi-Fraksi; dan Usulan

Presiden. Sementara apabila RUU dari DPR kolom DIM nya adalah: No. DIM; RUU; Usulan Presiden; dan Usulan DPD. Hal yang perlu diantisipasi berikutnya adalah pengaturan jadwal atau waktu pembahasan. Perlu ada waktu yang cukup bagi DPD untuk menyiapkan DIM, mengingat DPD harus menyatukan pendapat dan aspirasi dari daerah-daerah yang direpresentasikan oleh anggotanya.

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa hal yang langsung dapat diterapkan dan ada beberapa hal yang masih harus dikoordinasikan oleh DPR, Presiden, dan DPD. Selain dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang terkait, dapat dilakukan pula pembentukan peraturan bersama. Tuntutan DPD terhadap kewenangannya sebenarnya sudah disampaikan bahkan mulai pada periode sebelumnya. DPR dan DPD sudah pernah bertemu dan satu hal positif yang telah dicapai adalah kesepakatan terkait dengan penyelenggaraan Sidang Bersama DPR dan DPD untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden bulan Agustus, dan Sidang DPR dalam rangka penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangannya. Peraturan bersama mengenai hubungan mekanisme kerja antara DPR dan DPD sebenarnya sudah ada dalam bentuk rancangan, namun belum dibahas secara menyeluruh. Muncul pesimisme mengingat periode keanggotaan DPR dan DPD saat ini sudah menjelang akhir, namun demi peningkatan kinerja legislasi, upaya tersebut harus dilakukan. Apabila tidak dapat digunakan untuk periode ini, paling tidak DPR dan DPD periode ini memberikan landasan atau dasar bagi bekerjanya DPR dan DPD periode berikutnya dan juga menjadi bahan untuk penyempurnaan undang-undang berikutnya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya putusan MK terkait dengan kewenangan legislasi DPD telah mengubah praktek ketatanegaraan, khususnya di bidang legislasi atau pembentukan undang-undang. Putusan MK sekaligus juga merupakan

penafsiran bagaimana menjabarkan ketentuan yang ada di dalam UUD 1945 ke dalam undang-undang. Terdapat beberapa penafsiran dalam undang-undang yang dikoreksi melalui putusan MK, yaitu:

1. Mengenai kewenangan “dapat mengajukan RUU kepada DPR”, MK menyamakan kewenangan tersebut dengan kewenangan Presiden yang berhak mengajukan RUU kepada DPR. Perbedaannya Presiden berhak mengajukan RUU tanpa dibatasi bidang tertentu, sementara DPD dibatasi untuk bidang tertentu sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945. Dengan persamaan kewenangan tersebut, maka DPR tidak lagi melakukan pembahasan maupun pengambilan keputusan terhadap RUU yang diusulkan oleh DPD dan kemudian menjadikan RUU usul DPD tersebut sebagai RUU dari DPR.
2. Pengajuan RUU terkait dengan perencanaan yang tertuang di dalam Prolegnas. Untuk itu DPD juga mempunyai kewenangan untuk mengusulkan, membahas, dan memberikan persetujuan terhadap Prolegnas.
3. Mengenai “ikut membahas RUU”, DPD tidak lagi sekedar menyampaikan pandangan dan pendapat melainkan ikut serta dalam pembahasan, yang di dalam mekanisme DPR dilakukan melalui pembahasan DIM.
4. Namun demikian, meskipun DPD juga meminta dapat memberikan persetujuan terhadap RUU untuk disahkan menjadi undang-undang, MK memutuskan bahwa kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh DPD, melainkan tetap hanya dimiliki oleh DPR dan Presiden.
5. Terhadap kewenangan memberikan pertimbangan, MK juga tidak memberikan kewenangan lebih. Ada kewajiban DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, namun pertimbangan tersebut sifatnya tetap tidak mengikat.

Meskipun putusan MK langsung berlaku dan dapat dilaksanakan, namun implementasi terhadap putusan tersebut masih memerlukan pengaturan mekanisme teknis lebih lanjut. Untuk itu, perlu ada koordinasi antara Presiden, DPR, dan DPD mengenai mekanisme teknis pembentukan undang-undang pasca putusan MK tersebut.

B. Saran

Salah satu hal penting dari pembentukan undang-undang adalah dimulai dari perencanaan yang dalam hal ini Prolegnas. Prolegnas dapat dikatakan menjadi pintu masuk bagi pembentukan undang-undang dan bagaimana keterlibatan DPD dalam pembentukan undang-undang. Selain mengubah mekanisme penyusunan dan penetapan, hal penting yang harus dilakukan adalah mengubah format daftar prolegnas dengan disesuaikan undang-undang dan menambahkan keterangan kapasitas DPD dalam pembentukan RUU tersebut, apakah dapat mengajukan dan membahas bersama; memberi pertimbangan; atau tidak terkait dengan kewenangan DPD. Dengan adanya kesepakatan tersebut, akan memudahkan tahapan berikutnya, yaitu penyusunan dan pembahasan, karena tidak akan ada lagi perdebatan apakah RUU tersebut terkait dengan kewenangan DPD atau tidak.

Selanjutnya, agar pembentukan undang-undang dapat lebih efektif, diperlukan adanya peraturan yang mengatur mekanisme teknis pembentukan undang-undang antara DPR dan DPD. Peraturan tersebut telah dirintis sehingga yang perlu dilakukan berikutnya adalah melanjutkan pembahasan peraturan bersama tersebut. Meskipun tidak dapat digunakan untuk periode sekarang, namun paling tidak dapat memberikan landasan bagi DPR dan DPD periode berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (cetakan kedua). Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta; PT. Gramedia, 1988.
- Chen, Albert H. Y. *The Interpretation of the Basic Law-Common Law and Mainland Chinese Perspectives*. Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000.
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy; Government Forms and Performance in Thirty Six Countries*. Yale University Press, 1999
- Mason, Anthony. *The Interpretation of a Constitution in a Modern Liberal Democracy*, dalam Charles Sampford and Kim Preston (Ed.), *Interpreting Constitutions – Theories, Principles and Institutions*. Leichhardt, The Federation Press, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Palguna, I Dewa Gede. *Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah*. Makalah pada *Focus Group Discussion “Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”* di Semarang, 25 Maret 2003 dan di Malang, 26 Maret 2003 dalam Janedjri M. Gaffar. *et all* (editor), *Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta; Setjen MPR-UNDP, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Samsul, Innosentius, *et all*. (Tim Hukum P3DI, Setjen DPR RI). *Ruang Lingkup dan Mekanisme Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPD*. Jakarta, P3I Setjen DPR RI, 2003.

Internet

- M. Arsyad Sanusi, *Legal Reasoning dalam Penafsiran Konstitusi* dalam <http://arfanhy.blogspot.com/2009/03/legal-reasoning-dalam-penafsiran.html> diakses pada tanggal 22 Oktober 2013.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012.